



## The Optimization of Educational Management Through Efficient Financial Management: A Literature Review

Betti Nuraini<sup>1</sup>, Dheo Rimbano<sup>2</sup>, Gunadi<sup>3</sup>, Mulyadi<sup>4</sup>, Loso Judijanto<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Pascasarjana UHAMKA, <sup>2,3,4</sup>Universitas Bina Insan, <sup>5</sup>IPOSS Jakarta

<sup>1</sup>[bettinuraini@uhamka.ac.id](mailto:bettinuraini@uhamka.ac.id), <sup>2</sup>[dheo\\_rimbano@univbinainsan.ac.id](mailto:dheo_rimbano@univbinainsan.ac.id), <sup>3</sup>[gunadi@univbinainsan.ac.id](mailto:gunadi@univbinainsan.ac.id),

<sup>4</sup>[jupri8565@gmail.com](mailto:jupri8565@gmail.com), <sup>5</sup>[losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to explore and analyze various strategies for efficient financial management as part of optimizing educational management in schools. Using a literature study method (Library Research) that is qualitative in nature, the research finds that decentralization of educational management provides flexibility in budget allocation according to local needs, but also requires strict supervision to ensure efficiency and transparency. Transparency in financial management is key to preventing budget misuse and enhancing public participation, which in turn contributes to the success of education. Additionally, the implementation of technology, such as e-budgeting applications and web-based reporting systems, can improve efficiency, transparency, and accountability in managing educational budgets. This technology also facilitates monitoring and decision-making processes that are faster and data-driven, ensuring more accurate fund allocation and supporting optimal improvements in education quality.

**Keywords:** Educational Management, Finance, Literature Study

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa dan mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas (Rahmat, 2016). Untuk itu, pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya yang terbatas (Pujiharti, 2022). Salah satu sumber daya penting dalam dunia pendidikan adalah keuangan, yang sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu institusi pendidikan (Ashadi, 2016). Keuangan yang dikelola dengan baik akan mendukung pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Manajemen pendidikan yang optimal memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, serta evaluasi yang berkelanjutan (Haryono, 2024). Namun, tanpa pengelolaan keuangan yang efisien, upaya tersebut akan sulit terwujud. Banyak sekolah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran pendidikan dengan tepat, baik itu dalam hal pendanaan fasilitas pendidikan, gaji tenaga pendidik, maupun pengembangan program-program pendukung lainnya. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat guna agar pendidikan yang diberikan dapat memberikan hasil yang maksimal.



Pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya berfokus pada penghematan biaya, tetapi juga pada prioritas pengeluaran yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Darmiyanti et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran dapat dioptimalkan sehingga setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Studi tentang pengelolaan keuangan pendidikan ini menunjukkan bahwa terdapat banyak pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencapai efisiensi, mulai dari perencanaan anggaran yang berbasis pada kebutuhan riil, hingga pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran secara teratur.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pengelolaan keuangan pendidikan adalah kapasitas manajerial yang dimiliki oleh pihak sekolah (Rahmanto, 2019). Kepala sekolah, sebagai pemimpin lembaga pendidikan, memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan (Julaiha, 2019). Dalam konteks ini, kepala sekolah harus memiliki kompetensi dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi anggaran pendidikan dengan cermat (Astuti, 2019). Selain itu, mereka harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak internal sekolah maupun kepada pihak eksternal seperti dinas pendidikan atau masyarakat.

Dalam banyak kasus, keberhasilan manajemen pendidikan yang melibatkan pengelolaan keuangan yang efisien berhubungan erat dengan ketersediaan pelatihan dan pengembangan bagi para pengelola keuangan di sekolah. Studi literatur yang ada menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola keuangan di sekolah-sekolah dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pendidikan yang dihasilkan (Asriati, 2024). Selain itu, implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi faktor yang semakin penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.

Pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dalam manajemen pendidikan ini juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara fasilitas pendidikan (Komariah, 2018). Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai sangat berpotensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Nurkhalifa et al., 2024). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang cermat akan memungkinkan sekolah untuk terus memperbarui dan merawat fasilitas tersebut tanpa mengurangi kualitas pembelajaran yang diberikan. Hal ini menuntut para kepala sekolah untuk mampu mengelola anggaran dengan memperhatikan alokasi yang proporsional antara kebutuhan operasional dan investasi jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan yang efisien sebagai bagian dari upaya optimalisasi manajemen pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini akan mengkaji berbagai teori, model, dan praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai sekolah. Penelitian ini juga akan mencoba memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pengelola pendidikan dalam mengelola keuangan, serta bagaimana solusi-solusi yang ada dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen pendidikan yang lebih baik, serta memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih efisien dan efektif.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian studi literatur (*Library Research*) yang termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan teori yang relevan mengenai optimalisasi manajemen pendidikan melalui pengelolaan keuangan yang efisien. Studi literatur mengandalkan sumber-

sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya tulis lainnya yang dapat memberikan landasan teori yang kuat untuk penelitian ini.

Menurut Sarwono, (2006) studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan pengetahuan yang ada dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, melalui studi literatur, penelitian ini dapat menggali pemahaman mendalam tentang penerapan model Inside Outside Circle dalam meningkatkan keaktifan peserta didik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian literatur mengenai optimalisasi manajemen pendidikan melalui pengelolaan keuangan yang efisien, ditemukan sejumlah temuan penting yang memberikan gambaran bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

### **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan**

Desentralisasi pengelolaan pendidikan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan cara yang lebih sesuai dengan kondisi dan prioritas pendidikan setempat. Misalnya, daerah yang menghadapi masalah kekurangan fasilitas atau tenaga pendidik berkualitas dapat memprioritaskan pengalokasian dana untuk sektor tersebut. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, karena keputusan-keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Namun, hal ini juga menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat agar dana pendidikan digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir, (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan tepat. Pengelolaan yang terbuka memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa daerah yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan memiliki pengawasan yang lebih efektif, sehingga penggunaan dana lebih efisien. Selain itu, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan dana, yang membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Studi lain oleh Wulaningsih, (2024) menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Kepercayaan publik yang tinggi, menurut penelitian tersebut, berkontribusi pada partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat yang merasa yakin bahwa dana pendidikan digunakan dengan baik cenderung lebih terlibat dalam berbagai aktivitas pendidikan, mulai dari pengawasan hingga dukungan sumber daya, seperti sumbangan atau relawan. Ini juga mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dapat mempercepat perbaikan dalam kualitas pendidikan di daerah tersebut.

### **Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan**

Beberapa penelitian menyoroti pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pendidikan. Sistem informasi keuangan berbasis web dan aplikasi *e-budgeting* dapat mempermudah perencanaan anggaran, pemantauan penggunaan dana, serta pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan temuan Syachbrani, (2024), yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan telah terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses penganggaran dan pengawasan. Teknologi memungkinkan pengelolaan anggaran secara real-time, yang

mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahap penggunaan anggaran.

Penelitian Gunawan, (2016) juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *e-budgeting* dan sistem pelaporan berbasis web dapat memperkecil potensi kebocoran anggaran dan mempermudah proses audit. Dalam sistem tersebut, informasi mengenai penggunaan anggaran tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak terkait, seperti pemerintah pusat, lembaga pengawas, maupun masyarakat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Teknologi juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, karena pemerintah pusat dapat memantau secara langsung penggunaan dana di tingkat daerah.

Selain itu, Puspitawati, (2016) menemukan bahwa daerah yang telah menerapkan sistem informasi berbasis teknologi cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur dan terencana. Dengan sistem *e-budgeting*, pengalokasian dana menjadi lebih sistematis, meminimalkan kesalahan dalam perencanaan anggaran, dan memungkinkan evaluasi yang lebih tepat waktu terhadap alokasi anggaran yang sudah disalurkan. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi, tetapi juga dalam memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan pengelolaan yang kurang efisien dan meningkatkan transparansi. Sebagaimana diungkapkan oleh Supraja, (2019), penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi penggunaan dana. Teknologi memungkinkan pemantauan yang lebih efektif dan dapat memberikan data yang akurat bagi pihak pengambil keputusan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi dalam pengelolaan keuangan pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, yang merupakan elemen-elemen penting dalam sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan. Dengan dukungan sistem informasi yang baik, pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat daerah dapat lebih terkontrol, dan dana yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

### **Prioritas Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Kebutuhan**

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efisien, anggaran pendidikan harus dialokasikan berdasarkan prioritas yang paling mendesak. Pengalokasian dana yang tepat akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan berdasarkan prioritas lokal, seperti peningkatan kualitas guru atau perbaikan infrastruktur sekolah, cenderung memperoleh hasil yang lebih signifikan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan (Lembong et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya harus besar, tetapi juga harus digunakan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran.

Dalam konteks ini, Saksono, (2021) juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang berbasis pada kebutuhan nyata dan urgensi di masing-masing daerah. Misalnya, di daerah yang kekurangan tenaga pendidik berkualitas, anggaran dapat difokuskan pada pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Sementara itu, daerah yang memiliki masalah infrastruktur pendidikan yang rusak, seperti ruang kelas yang tidak layak, dapat memprioritaskan dana untuk renovasi dan pembangunan fasilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran yang tepat akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas

pendidikan, dibandingkan dengan pengalokasian yang tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah.

Studi lain oleh Mushthofa et al., (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan yang berbasis pada prioritas yang tepat dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Dengan memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk mendukung kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, seperti sekolah di daerah terpencil atau anak-anak dari keluarga kurang mampu, kualitas pendidikan dapat diperbaiki secara merata. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Huda, (2020), yang menyatakan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan yang berfokus pada pengentasan kesenjangan pendidikan antar daerah dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, pengalokasian anggaran pendidikan yang berbasis pada prioritas yang paling mendesak akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan mengidentifikasi dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak, pengelolaan keuangan pendidikan dapat lebih efisien, transparan, dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata di seluruh daerah.

### **Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Pendidikan**

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efisien, anggaran pendidikan harus dialokasikan berdasarkan prioritas yang paling mendesak. Pengalokasian dana yang tepat akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andryan, (2024) mengungkapkan bahwa daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan berdasarkan prioritas lokal, seperti peningkatan kualitas guru atau perbaikan infrastruktur sekolah, cenderung memperoleh hasil yang lebih signifikan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya harus besar, tetapi juga harus digunakan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran.

Dalam konteks ini, Sitorus, (2024) juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang berbasis pada kebutuhan nyata dan urgensi di masing-masing daerah. Misalnya, di daerah yang kekurangan tenaga pendidik berkualitas, anggaran dapat difokuskan pada pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Sementara itu, daerah yang memiliki masalah infrastruktur pendidikan yang rusak, seperti ruang kelas yang tidak layak, dapat memprioritaskan dana untuk renovasi dan pembangunan fasilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran yang tepat akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dibandingkan dengan pengalokasian yang tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah.

Studi lain oleh Sari, (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan yang berbasis pada prioritas yang tepat dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Dengan memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk mendukung kelompok-kelompok yang paling membutuhkan, seperti sekolah di daerah terpencil atau anak-anak dari keluarga kurang mampu, kualitas pendidikan dapat diperbaiki secara merata. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Hadi, (2024), yang menyatakan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan yang berfokus pada pengentasan kesenjangan pendidikan antar daerah dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Riyadi et al., (2023) bahwa untuk memastikan pengalokasian anggaran yang tepat, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pihak sekolah, dalam proses perencanaan anggaran. Dengan melibatkan mereka dalam pengidentifikasian kebutuhan prioritas, alokasi anggaran akan lebih sesuai dengan kondisi lokal dan lebih tepat sasaran. Partisipasi aktif ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi, yang pada gilirannya akan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Kapasitas pengelola keuangan di lembaga pendidikan sangat memengaruhi efisiensi pengelolaan dana. Pengelola yang terlatih dengan baik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran akan lebih mampu mengelola keuangan secara efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dana untuk mendukung tujuan pendidikan. Menurut Lahagu, (2024) pengelola yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam manajemen keuangan dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, maupun perbaikan fasilitas sekolah. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi manajerial dalam pengelolaan keuangan perlu menjadi bagian dari upaya optimalisasi manajemen pendidikan, agar sistem pendidikan dapat berjalan lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Secara keseluruhan, pengalokasian anggaran pendidikan yang berbasis pada prioritas yang paling mendesak dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan di daerah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan. Dengan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan terarah, serta bahwa anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, sistem pendidikan dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

### **Hubungan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Optimalisasi Manajemen Pendidikan Melalui Pengelolaan Keuangan yang Efisien**

Optimalisasi manajemen pendidikan sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang efisien. Dalam konteks ini, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dihimpun dengan baik melalui pajak yang terutang. DPP adalah dasar untuk menghitung pajak yang dibayarkan, baik dalam transaksi barang dan jasa (seperti PPN) maupun dalam sektor lainnya, dan ini berhubungan langsung dengan pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai pendidikan (Marsadita, 2022). Sistem perpajakan yang efisien akan menghasilkan pendapatan yang memadai, yang kemudian dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan DPP di daerah-daerah sangat penting untuk menciptakan alokasi dana yang tepat guna dan mendukung pengelolaan pendidikan yang efektif.

Dalam sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan, kewenangan untuk mengelola anggaran pendidikan tidak hanya ada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan alokasi anggaran pendidikan dengan kebutuhan lokal yang lebih spesifik. Pengelolaan keuangan yang efisien melalui DPP dapat memastikan bahwa daerah mendapatkan pendapatan pajak yang cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur sekolah atau peningkatan kualitas guru. Penelitian oleh Meilinda, (2013) menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengoptimalkan pengelolaan pajak lokal melalui penerapan DPP yang tepat cenderung memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar untuk mendukung program pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di daerah tersebut dapat meningkat.

Namun, pengelolaan DPP yang efisien tidak hanya bergantung pada alokasi yang tepat, tetapi juga memerlukan pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, potensi penyalahgunaan atau pemborosan dana bisa menghambat efektivitas penggunaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan pendidikan yang efisien, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa

penggunaan DPP di daerah-daerah berjalan dengan baik, terukur, dan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, ketimpangan kapasitas keuangan antar daerah menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan pendidikan melalui DPP. Daerah yang memiliki potensi ekonomi yang lebih besar cenderung dapat mengumpulkan lebih banyak pajak, sementara daerah dengan kapasitas ekonomi yang lebih rendah kesulitan untuk mengelola DPP secara efisien dan menghasilkan pendapatan yang memadai. Ketimpangan ini dapat memperburuk kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar daerah. Oleh karena itu, redistribusi anggaran yang lebih adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa daerah yang lebih miskin atau kurang berkembang juga memperoleh cukup dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Penelitian oleh Hababil et al., (2024) menunjukkan bahwa redistribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah dan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

Untuk mengatasi tantangan ini dan mengoptimalkan manajemen pendidikan, penguatan kapasitas pengelola keuangan daerah menjadi langkah yang sangat penting. Pengelola keuangan yang terlatih dengan baik dalam merencanakan dan mengelola anggaran berbasis pada DPP yang efisien akan lebih mampu memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung pendidikan. Pelatihan berkelanjutan untuk pengelola keuangan di tingkat daerah dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun anggaran yang tepat, memantau penggunaan dana, serta mengidentifikasi prioritas pendidikan yang harus didanai.

Selain itu, pengelolaan DPP yang lebih terintegrasi dengan teknologi juga dapat mendukung pengelolaan keuangan yang efisien. Penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi, seperti *e-budgeting* atau aplikasi pelaporan pajak, memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memantau aliran dana pendidikan secara real-time, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pengawasan. Ridwan & Nurhakim, (2014) menyarankan bahwa penggunaan sistem informasi yang lebih canggih dalam pengelolaan pajak dapat meningkatkan akuntabilitas dan membantu daerah untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan berbasis data dalam mengalokasikan anggaran pendidikan.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan manajemen pendidikan melalui pengelolaan keuangan yang efisien, diperlukan upaya yang terintegrasi antara pengelolaan DPP yang tepat, penguatan kapasitas pengelola keuangan daerah, serta pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan berbasis teknologi. Pengelolaan DPP yang efisien dapat memastikan bahwa dana pendidikan yang tersedia digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan memastikan pemerataan dalam akses pendidikan yang berkualitas.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti peningkatan fasilitas dan kualitas tenaga pendidik. Namun, untuk mencapai efisiensi, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparansi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan sangat penting untuk memastikan dana digunakan dengan tepat, mengurangi penyalahgunaan anggaran, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan. Selain itu, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan dukungan pendidikan. Sistem pelaporan keuangan yang terbuka juga dapat mengurangi kesalahan anggaran dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi *e-budgeting* dan sistem pelaporan berbasis web, memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Dengan penerapan teknologi, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara real-time, mempermudah pemantauan dan pengawasan, serta mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data, yang pada gilirannya mengoptimalkan kualitas pendidikan di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andryan, M. I. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1).
- Ashadi, F. (2016). PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. *SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN 2016 SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN 2016*, 1(2), 717–729.
- Asriati, N. (2024). Evaluasi Sistem Manajemen Keuangan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ): Dampak terhadap Kualitas Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(1), 1756–1764.
- Astuti. (2019). Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 435–449.
- Darmiyanti, A., Rukajat, A., Islam, F. A., Karawang, U. S., & Sekolah, S. K. (2024). Strategi Kepala Sekolah dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs Mathla'ul Huda Cikande Karawang. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 375–380.
- Gunawan, D. R. (2016). PENERAPAN SISTEM E-BUDGETING TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PUBLIK (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–102.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., & Alghifary, M. R. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Hadi, S. (2024). PERAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA. *Indonesian Treasury Review*, 9(1), 25–42.
- Haryono. (2024). Buku Referensi Manajemen Pendidikan. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Huda. (2020). Manajemen pembiayaan pendidikan di sma negeri pascadesentralisasi pendidikan. *JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 332–341.
- Julaiha. (2019). *Konsep kepemimpinan kepala sekolah*.
- Komariah. (2018). Konsep manajemen keuangan pendidikan. In *Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam*.
- Lahagu. (2024). Manajemen pendidikan: Teori & referensi komprehensif untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. In *PT. Sonpedia Publishing*

Indonesia.

- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., Nicodemus, V., & Rotty, J. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio*, 9(2), 765–777.
- Marsadita, B. (2022). MEKANISME PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELOPORAN PPN ATAS BELANJA BKP PADA CV. TIMUR JAYA. *Jurnal Aplikasi*, 3(1), 51–70.
- Meilinda. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. In *Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Muhajir, N. M. N. (2023). Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 4684–4689.
- Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64–76.
- Nurkhalifa, A. S., Harun, H., Kambau, A. M. C., Djemma, U. A., & Pembelajaran, M. (2024). SIGNIFIKANSI RELASI SARANA DAN PRASARANA TERHADAP MUTU PEMBELAJARAN PADA SMKN I LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Andi Djemma*, 7(1), 187–195.
- Pujiharti. (2022). Peran sumber daya pendidik dalam perspektif ekonomi pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 35–50.
- Puspitawati, D. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. In *Masters thesis, Universitas Lampung*.
- Rahmanto. (2019). Manajemen Pembiayaan Sekolah. In *Gre Publishing*.
- Rahmat, P. S. (2016). PERAN PENDIDIKAN DALAMMEMBENTUK GENERASI BERKARAKTER PANCASILA. *Pedagogi Jurnal Penelitian Pendidikan*, 03(02), 1–15.
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI. XI(1), 403–422.
- Riyadi, S., Nuswantoro, P., Merakati, I., Sihombing, I., Isma, A., Abidin, D., Inklusif, P., Guru, K., Siswa, P., Tim, K., & Sekolah, K. (2023). OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(3), 130–137.
- Saksono, H. (2021). BRIDA : The Urgency of Formation and Strategic Position as a Solution to Development and Improvement of Local Governmen. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 178–196.
- Sari, A. A. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI TEKNOLOGI

DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL. *Cendikia Cendikia*, 2(6), 196–204.

Sarwono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In *Graha Ilmu*. Yogyakarta.

Sitorus, E. R. B. (2024). Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tingkat SMP di Indonesia Tantangan dan Strategi Penanganan. *Jurnal Pendas Mahakam*, 9(1), 73–84.

Supraja, G. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, Politeknik Negeri Bengkalis.

Syachbrani, W. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *BIJAC: Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5(1).

Wulaningsih, R. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia*, 4(1), 1723–1732.